

PERAN RELAWAN DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KOTA SURABAYA PADA PILWALI 2020

Ruwinda Ayu Dwi Nurlaily¹ dan Agus Machfud Fauzi²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-Unesa

ruwinda.18115@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The Democracy Volunteers formed by the Election Commission is a social movement aimed at mobilizing voters to be active in the election stage. To achieve the target level of community participation that has been set in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) of 77.5% and face the challenge that the 2020 Simultaneous Elections are held in the midst of the Covid-19 virus pandemic, KPU Surabaya City formed a democracy volunteer program that became kpu's partner in carrying out the agenda of socialization and voter education based in the city of Surabaya. This research uses qualitative methods with a perspective on the theory of Social Action by Max Weber. The results of this study show that the Democracy Volunteers formed by the Surabaya City KPU in PILWALI 2020 have not performed their role optimally because democracy volunteers have not been able to build public awareness and volunteerism of the people of the City of Surabaya to vote for PILWALI 2020. This is because not all democratic volunteer bases deliver materials that can build public awareness. Democracy volunteers are focused only on delivering election times, introducing candidates' spouses, and voting procedures properly. Thus, this can be one of the factors that the increase in the number of community participation in PILWALI 2020 has not increased significantly. The socialization strategy carried out by KPU Surabaya City democracy volunteers is different in each base including door to door, cooperation with organizations, online, simulations, discussions to participate in citizen forums.

Keywords: Role, Volunteer Democracy, Social Action

Abstrak

Relawan Demokrasi yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan gerakan sosial yang ditujukan untuk menggerakkan pemilih agar aktif dalam tahapan pemilihan. Untuk mencapai target tingkat partisipasi masyarakat yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 77,5% dan menghadapi tantangan bahwa Pemilihan Serentak Tahun 2020 diselenggarakan di tengah masa pandemi virus Covid-19, KPU Kota Surabaya membentuk program relawan demokrasi yang menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih

berbasis di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan prespektif teori Tindakan Sosial oleh Max Weber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Relawan Demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya pada PILWALI 2020 telah melakukan peranannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu memberikan informasi tentang pelaksanaan PILWALI 2020 dan mengajak masyarakat Kota Surabaya untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Surabaya tahun 2020. Dalam menjalankan agenda sosialisas, terdapat kendala yang dialami oleh relawan demokrasi diantaranya yaitu pembekalan yang kurang maksimal, masa kerja yang terlalu singkat, pandemi, anggaran yang terbatas, keanggotaan yang kurang aktif, hingga pembagian perlengkapan sosialisasi yang datang terlambat. Selain itu, KPU Kota Surabaya juga tidak melakukan pengawasan secara langsung ketika relawan demokrasi melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Relawan Demokrasi, Tindakan Sosial

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki makna bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat yang kemudian dijalankan melalui sistem perwakilan [1]. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan figur dan arah kepemimpinan suatu negara atau daerah dalam periode tertentu [2]. Melalui pemilu, masyarakat akan memilih wakilnya, kemudian para wakil yang telah dipilih diberikan mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara. Pemilu dilaksanakan oleh Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, nilai-nilai demokrasi, dan meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis [3].

Berdasarkan pada pengertian diatas maka peran publik, pemilih, dan masyarakat tidak dapat diabaikan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan menjadi salah satu faktor utama dalam menilai kualitas pemilihan. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan tidak hanya seputar seberapa banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya di bilik suara, melainkan sejauh mana kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Kesadaran politik dapat dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih wakil yang dipercaya untuk menyuarakan aspirasi mereka nantinya [4]. Sehingga partisipasi pemilih menjadi wujud penting yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan pemilihan. Pada hakikatnya, pemilihan merupakan bentuk penyerahan mandat dari pemilih kepada yang dipilih dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sehingga, partisipasi pemilih menjadi wujud paling penting yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan pemilihan.

Dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), KPU RI telah menetapkan target partisipasi masyarakat sebesar 77,5% pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun

2020. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Rendahnya motivasi, kesadaran politik dan pendidikan pemilih pada masyarakat dapat menimbulkan fenomena golongan putih (golput). Faktanya pada pemilihan Kota Surabaya tahun 2015 angka golput masyarakat mencapai 48,2%, sedangkan partisipasi pemilih sekitar 52,17%. Untuk mengantisipasi melonjaknya fenomena golput pada Pemilihan Serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk tim khusus yang bernama “Relawan Demokrasi”. Relasi sendiri dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Pilwali tahun 2020 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. Pilwali tahun 2020 sedikit berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya, karena pada pilwali tahun 2020 diselenggarakan dalam situasi khusus yaitu ditengah merebaknya pandemi virus Covid-19. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Surabaya pada Pilwali tahun 2020, Relawan Demokrasi menjadi mitra KPU Kota Surabaya dalam memberikan sosialisasi mengenai pendidikan pemilih kepada masyarakat. Relawan Demokrasi menjadi mitra KPU Kota Surabaya dalam memberikan sosialisasi mengenai aspek-aspek pemilu, kepemiluan, dan demokrasi. Dalam hal ini pendidikan pemilih dibutuhkan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem pemilihan, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana sistem akan bekerja. Angka kecurangan pada pemilihan, konflik pada pemilihan, dan mobilisasi pemilih dapat diminimalisir melalui pendidikan pemilih sehingga dapat menghasilkan pemenang pemilihan yang berkualitas [5].

Dibentuknya program relawan demokrasi dilatar belakangi oleh meningkatnya angka golongan putih pada pemilihan-pemilihan sebelumnya. Pada Pilwali Kota Surabaya tahun 2010 angka golput masyarakat hampir mencapai 60%, dimana angka tersebut merupakan angka yang tertinggi dalam pelaksanaan pilkada di berbagai daerah di Indonesia [6]. Banyak faktor yang menjadikan masyarakat untuk tidak berpartisipasi pada pemilihan, diantaranya yaitu masyarakat menganggap bahwa datang ke TPS tidak lagi penting karena tidak ada isu yang signifikan, menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap performan pemerintah, mal-administrasi penyelenggaraan pemilihan, adanya kecenderungan budaya politik yang ada dalam masyarakat, hingga melemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan [7]. Oleh karena itu, program relawan demokrasi dibentuk dengan harapan agar partisipasi masyarakat pada pilwali tahun 2020 dapat meningkat.

Sosialisasi pendidikan pemilih yang diberikan oleh relasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan meningkatkan pemilihan. Sosialisasi yang diberikan oleh relasi membahas mengenai pentingnya demokrasi dalam pemilihan, tanggal pelaksanaan pemilihan, tata cara pelaksanaan pemungutan suara, hingga mengajak masyarakat untuk menolak money politic dan menghindari golput. Dengan kata lain, pendidikan pemilih yang diberikan oleh anggota relasi membuat masyarakat aktif dalam pemberian suara dan berpartisipasi dalam proses politik yang lebih luas [8]. Dalam pelaksanaanya, program relawan demokrasi yang digagas oleh KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih muda, basis pemilih pemula, basis

penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis perempuan, basis keagamaan, basis komunitas, basis warga internet (netizen), basis kaum marginal dan basis relawan demokrasi [9]. Pelopor-pelopor demokrasi ini nantinya akan dibentuk disetiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya.

Pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020, program relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya dinilai berhasil dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Naiknya angka partisipasi masyarakat Kota Surabaya pada Pilwali 2020 tentunya tidak hanya dari 1 faktor saja, melainkan beberapa faktor lainnya dan salah satunya adalah peran dari relawan demokrasi (relasi). Ke-11 basis relawan demokrasi KPU Kota Surabaya memiliki strategi yang beda-beda dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu strategi yang digunakan oleh Relawan Demokrasi (relasi) KPU Kota Surabaya basis keluarga yaitu melakukan sosialisasi dengan cara door to door ke rumah warga dengan menggunakan alat peraga untuk memudahkan sosialisasi [10]. Materi sosialisasi yang diberikan oleh relasi basis keluarga membahas mengenai pentingnya demokrasi dalam pemilihan, tanggal pelaksanaan pemilihan, dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara di masa pandemi. Sedangkan relawan demokrasi basis disabilitas melakukan sosialisasi dengan mengunjungi rumah tiara handicraft yang memiliki banyak pegawai disabilitas. Keberhasilan relawan demokrasi (relasi) KPU Kota Surabaya dalam menjadi mitra KPU dibuktikan dengan adanya peningkatan sebesar 0,23% pada pilwali Kota Surabaya tahun 2020.

Tabel 1.1 Data perbandingan angka partisipasi pemilih di Kota Surabaya pada 2 PILWALI terakhir	
Pilwali Tahun	Angka partisipasi Pilwali Kota Surabaya
2015	52,17%
2020	52,40%

Sumber data : KPU Kota Surabaya

Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena peneliti ingin mengetahui bagaimana peran relawan demokrasi yang telah dibentuk oleh KPU Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilwali 2020. Terlebih lagi, pada pilwali 2020 diselenggarakan di tengah merebaknya pandemi virus Covid-19 sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kota Surabaya sebagai penyelenggara dan relawan demokrasi sebagai mitra KPU dalam memberikan sosialisasi pendidikan pemilih. Penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi pada Pemilu 2014 di KPU Kota Yogyakarta” menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor keberhasilan, yaitu faktor komunikasi antara komisioner dengan ketua relasi sudah cukup jelas, sumber daya sebanyak 25 orang dinilai cukup, komitmen dari relawan demokrasi, serta struktur birokrasi yang tercermin dalam struktur organisasi dan SOP relawan demokrasi KPU Kota Yogyakarta sudah mencerminkan efisiensi dan kejelasan fungsi dan

wewenang [11]. Penelitian berikutnya yaitu “Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilu 2019” menunjukkan bahwa anggota relasi telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh. Kendala yang dirasakan adalah penggunaan gaya bahasa, teknik, waktu, dan mental hingga pola pikir masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya demokrasi [12].

Keterbatas penelitian sebelumnya serta latar belakang masalah yang ada menjadi sebab penelitian ini dilakukan. Peran relawan demokrasi yang berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilwali Kota Surabaya tahun 2020 serta kendala yang dihadapi oleh relawan demokrasi dalam melakukan sosialisasi perlu dijawab. Penelitian ini menjadi pendukung bagi penelitian-penelitian sebelumnya dengan melihat dari sudut pandang sosiologi. Selama ini penelitian mengenai relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih hanya berfokus pada peran dan kendala yang dihadapi oleh relasi. Jauh lebih dari itu dalam penelitian ini akan membahas mengenai kemunculan relasi, perkembangan relasi, aktor-aktor siapa saja yang ada di balik relasi, hingga kenaikan angka partisipasi masyarakat Kota Surabaya pada Pilwali tahun 2020 yang dinilai tidak signifikan. Berangkat dari beberapa hal diatas, maka peneliti merumuskan judul penelitian “Peran Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Surabaya pada PILWALI tahun 2020”.

2. Kajian Pustaka

1) Penelitian terdahulu

Joko Susilo dan Siti Rodhiyah, “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019” memiliki hasil penelitian yaitu sosialisasi masif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang telah berhasil dan tepat sasaran yaitu pemilih pemula menjadi prioritas utama. Selain itu, KPU Kabupaten Semarang juga membentuk relawan demokrasi (relasi) dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat terjangkau dalam proses sosialisasi. Keberhasilan KPU Kabupaten Semarang dibuktikan dengan jumlah partisipasi pemilih di Pemilu serentak 2019 sebanyak 86% dan telah melampaui target yang diharapkan yaitu 80% [13].

Alfi Ziyadatul Fithriyah, “Peran Relawan Demokrasi dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sidoarjo” menunjukkan bahwa peran relasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu yaitu dengan melakukan sosialisasi dan mengenalkan setiap daerah pilih (dapil). Hal tersebut bertujuan agar pemilih dapat mengenal setiap daerah pilihannya dan juga mengenal calon yang dipilih. Sasaran utama relasi dalam melakukan sosialisasi adalah di sekolah, universitas, dan karang taruna desa. Bukti adanya peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula adalah meningkatnya angka pemilih dalam DPT pada pemilu 2019 berjumlah 1.139.728, sedangkan pada tahun 2015 sebelum adanya relasi jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 613.512 [14].

Khusnul Khotimah, “Kinerja KPUD Kota Batu dalam Meningkatkan *Electoral Activity* pada PILGUB tahun 2018” menunjukkan bahwa KPUD Kota Batu telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu. Dimulai dari sosialisasi pelaksanaan PILKADA, sosialisasi dengan pemangku kepentingan, *launching* Pilkada serentak melalui *event* gerak jalan sehat, kegiatan KPU *Goes To School*, hingga pembentukan relawan demokrasi. Keberhasilan kinerja KPUD Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu dan menekan angka golput dibuktikan dengan naiknya tingkat partisipasi masyarakat Kota Batu pada Pilgub 2018 berjumlah 75,29 dibandingkan dengan Pilgub tahun 2013 [15].

Syulhenisari Siregar, “Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Legislatif 2014 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula dengan sosialisasi secara langsung dan melalui media cetak maupun elektronik. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan cara mendatangi beberapa sekolah, mengadakan karnval keliling, serta melakukan sosialisasi dengan mengadakan kegiatan gerak jalan santai. Sosialisasi melalui media cetak dengan mencetak brosur, iklan, spanduk, dan menerbitkan buku sosialisasi [16]. Adapun faktor penghambat dalam melakukan sosialisasi yaitu waktu yang terbatas dan sulitnya menjumpai pemilih pemula yang tidak berada di tempat.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaan yakni penelitian lain hanya fokus mengenai peran relasi dan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya dilakukan untuk mengetahui peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat saja, melainkan dalam penelitian ini juga akan menjawab apa saja hambatan yang dialami oleh relasi serta membedah siapa saja aktor-aktor dalam relasi.

2) Teori Tindakan Sosial Max Weber

Pemikiran Weber yang paling terkenal adalah pemikirannya mengenai pemahaman subjektif (*verstehen*). Pemahaman subjektif digunakan sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subjektif dari tindakan sosial. Metode *verstehen* merupakan suatu cara atau usaha untuk memahami tindakan seseorang yang memiliki makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan pada orang lain (*syukur*). Untuk memahami tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk tindakan sosial atau bukan, maka harus memahami makna dibalik tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut.

Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan dari pelaku atau aktor [17]. Dapat dikatakan sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut mempunyai makna atau arti subjektif bagi pelaku dan tindakannya diarahkan kepada orang lain bukan benda mati [18]. Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau subjektif bagi pelaku karena adanya pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan pada situasi tertentu, tindakan sosial juga dapat berupa tindakan yang sudah menjadi kebiasaan atau tindakan yang telah dilakukan berulang-ulang. Dengan

menggunakan teori ini, kita dapat memahami tindakan dari setiap individu atau kelompok berdasarkan motif dan tujuan aktor melakukan tindakannya. Dengan memahami tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, maka secara tidak langsung dapat dipahami dan menghargai alasan seorang individu dalam melakukan tindakan. Dalam tindakan sosial, manusia melakukan suatu tindakan karena mereka memutuskan untuk melakukannya dan ditujukan untuk mencapai apa yang mereka inginkan atau kehendaki [19]. Tindakan sosial bisa dilakukan oleh seorang individu atau secara berkelompok dan dalam melakukannya aktor dapat memberikan pengaruh bagi lingkungannya. Sejalan dengan hal itu, Weber mengatakan bahwa tindakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi individu-individu lain yang ada dalam masyarakat (Putra). Adapun 5 ciri pokok tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan sosial :

- 1) Tindakan yang dilakukan oleh aktor mengandung makna subyektif;
- 2) Berupa tindakan nyata yang bersifat membanting
- 3) Tindakan yang berasal dari pengaruh positif atau suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, dan tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam;
- 4) Tindakan yang dilakukan dan diarahkan kepada seseorang atau sekelompok individu;
- 5) Tindakan tersebut memperhastikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain tersebut (Ritzer:39).

Berdasarkan dari kelima ciri-ciri tindakan sosial diatas, dapat disimpulkna bahwa tidak semua tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Tindakan nyata yang dilakukan seorang individu atau kelompok apabila diarahkan pada benda mati tidak termasuk dalam tindakan sosial. Misalnya terdapat 2 orang yang sama-sama membuka payungnya ketika turun hujan, tidakan 2 orang tersebut bukan termasuk tindakan sosial karena tindakannya diarahkan pada hujan yang merupakan benda mati dan bukan kepada orang lain.

Rasionalitas menjadi konsep dasar yang digunakan Weber dalam mengklasifikasikan tipe-tipe tindakan sosial. Konsep rasionalitas menjadi aspek penting dalam menganalisis arti-arti subjektif [20]. Perbedaan pokok yang diberikan adalah antara tindakan rasional dan tindakan non-rasional. Singkatnya, menurut Weber tindakan rasional yaitu tindakan yang berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Atas dasar rasionalitas, Weber mengemukakan 4 macam tipe tindakan yaitu tindakan rasionalitas instrumental (*zwerk rational*), tindakan sosial berorientasi nilai (*werktrational action*), tindakan sosial tradisional (*traditional action*), dan tindakan afektif (*affectual action*).

1) Tindakan rasionalitas instrumental (*zwerk rational*)

Tindakan ini meliputi pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan dari suatu tindakan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, individu sebagai makhluk sosial dinilai

memiliki macam-macam tujuan yang ingin dicapainya, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut seorang individu harus memikirkan alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuannya. Hal ini mencakup pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berserta hambatannya, hingga meramalkan konsekuensi-konsekuensi yang akan diperolehnya dari tindakan yang dilakukan

Weber menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan rasional apabila dalam tindakan tersebut terdapat pertimbangan secara rasional atas tujuan, alat, dan akibat-akibatnya. Dengan demikian, dalam tindakan tipe ini lebih menekankan pada rasio (akal) sebagai alat yang digunakan untuk mendasari tindakan-tindakan tersebut yang kemudian diikuti oleh sejumlah tujuan-tujuan yang ingin dicapainya, sehingga dapat dikatakan sebagai tindakan yang masuk akal.

2) Tindakan sosial berorientasi nilai (*werktional action*)

Tindakan ini didasarkan pada nilai-nilai dasar yang berlaku di masyarakat. Hal yang mendasari tindakan ini adalah kriteria baik atau buruk, sah dan tidaknya menurut nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam tindakan ini, tercapai atau tidaknya suatu tujuan tidaklah penting, tetapi yang menjadi penting adalah kesesuaian antara tindakan yang dilakukan oleh aktor dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini masih dapat dikatakan sebagai tindakan yang rasional meski tidak serasional tindakan yang pertama, karena dalam tindakan ini terdapat cara atau strategi yang dapat menentukan tujuan yang ingin dicapai.

3) Tindakan tradisional (*tradition action*)

Tindakan ini merupakan tipe tindakan non-rasional. Dikatakan sebagai tindakan yang tidak rasional karena tindakan ini berorientasi pada suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Kemudian, suatu tindakan tergolong tindakan tradisional apabila tindakan yang dilakukan oleh individu memperlihatkan kebiasaan tanpa adanya gerakan yang sadar atau perencanaan. Tindakan tradisional tidak mempertimbangkan aspek rasional, melainkan lebih menekankan pada aspek kebiasaan atau adat istiadat yang ada di masyarakat. Tipe tindakan ini biasanya dilakukan tanpa adanya perencanaan terutama pada cara yang dilakukan dalam tindakan tersebut.

4) Tindakan afektif (*affectual action*)

Tindakan ini merupakan tindakan yang didasari oleh perasaan atau emosi tanpa adanya perencanaan yang sadar. Dikatakan sebagai tindakan afektif apabila tindakan ini dilakukan oleh seseorang yang sedang mengungkapkan perasaannya seperti cinta, kesedihan, kemarahan, ketakutan, kegembiraan secara spontan tanpa adanya perencanaan. Weber mendefinisikan tindakan ini sebagai tindakan yang tidak rasional karena dalam tindakan ini tidak ada pertimbangan yang logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya [20].

Dari keempat tipe tindakan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber merupakan tindakan yang memiliki tujuan baik bagi masyarakat, tetapi tujuan tersebut

kembali kepada aktor yang melakukan tindakan tersebut, dimana nantinya tindakan yang dilakukan dapat memberikan pengaruh yang positif atau justru merugikan orang lain. Teori tindakan sosial Max Weber dipilih untuk menjelaskan mengenai “Peran Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Surabaya pada PILWALI Tahun 2020” ini dirasa tepat. Sejalan dengan peran yang dilakukan oleh relawan demokrasi terbentuk karena adanya tindakan yang berorientasi pada suatu tujuan, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat pada PILWALI 2020. Kemudian dari sebuah tujuan tersebut, relawan demokrasi sebagai aktor memikirkan alat atau sarana untuk mencapai tujuan tersebut yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada PILWALI 2020.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan karena peneliti ingin mengidentifikasi secara mendalam mengenai apakah peran relawan demokrasi sudah berjalan dengan optimal atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia [21]. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mempelajari mengenai peran suatu kelompok dengan menelaah kesadaran subjek dalam melakukan tindakan. Lokasi penelitian berada di Kota Surabaya sebagai salah satu dari 261 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2020 serta menjadi kota yang membentuk program relawan demokrasi pada Pilwali 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak 2020. Dalam pemilihan serentak 2020, partisipasi masyarakat Kota Surabaya mengalami kenaikan sebanyak 0,23%, kenaikan tersebut menjadi suatu keberhasilan tersendiri bagi relawan demokrasi yang telah dibentuk oleh KPU Kota Surabaya. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada rentang bulan Maret 2022 s/d Mei 2022.

Subyek penelitian ini merupakan 7 (tujuh) anggota relawan demokrasi yang menjadi koordinator disetiap basisnya. Dari 10 basis relawan demokrasi, peneliti hanya dapat menemui 7 basis yang kemudian dilakukan wawancara dengan ke-7 informan yakni berasal dari relawan demokrasi basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis perempuan, basis marjinal, basis penyandang disabilitas, dan basis warga internet. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek yaitu pertama melakukan wawancara dengan pihak KPU Kota Surabaya, kemudian meminta salah satu kontak anggota relawan demokrasi. Selanjutnya, peneliti menghubungi subyek pertama dan meminta informasi kontak anggota relawan demokrasi lainnya kepada subyek pertama.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman wawancara dan pertanyaan pokok tersebut akan berkembang ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan pertama kali dengan pihak KPU Kota Surabaya sekaligus meminta informasi mengenai kontak anggota relawan demokrasi. Setelah mendapatkan kontak relawan demokrasi, peneliti melakukan

wawancara dengan anggota relawan demokrasi yang menjadi koordinator di setiap basisnya. Selain wawancara, dalam pengumpulan data peneliti juga melakukan analisis dokumentasi. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis dan penarikan kesimpulan pada dokumen laporan kegiatan relawan demokrasi, dokumen evaluasi kegiatan relawan demokrasi, dan dokumen evaluasi partisipasi masyarakat oleh KPU Kota Surabaya. Sedangkan, teknis analisis data menggunakan tahapan analisis data menurut [22] yaitu melalui tiga tahapan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Peran Relawan Demokrasi dalam Menunjang Kinerja KPU Kota Surabaya

Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya menjadi salah satu pilar utama dalam Pemilihan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan menjadi legitimasi atas hasil pemilihan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat dari kehadiran dalam memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara (tps), melainkan melibatkan partisipasi masyarakat pada keseluruhan tahapan pemilu.

Dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Serentak 2020, KPU Kota Surabaya membentuk tim khusus yang disebut sebagai relawan demokrasi. Program relawan demokrasi dibentuk khusus untuk membantu KPU Kota Surabaya dalam menjalankan agenda sosialisasi kepada masyarakat berdasarkan basis pemilihan. Kenaikan angka partisipasi kepada masyarakat berdasarkan pemilihan. Kenaikan angka partisipasi masyarakat pada PILWALI 2020 di Kota Surabaya sebesar 52,40% menjadi suatu keberhasilan KPU Kota Surabaya dalam menjalankan pemilihan ditengah pandemi virus Covid-19. Kenaikan sebesar 0,23% tersebut tentu tidak terlepas dari peran relawan demokrasi yang menjadi mitra KPU Kota Surabaya dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pihak KPU dimana adanya relawan demokrasi pada PILWALI 2020 Kota Surabaya memberikan dampak positif, terlebih lagi relawan demokrasi melakukan sosialisasi di beberapa komponen masyarakat yang belum terjangkau oleh KPU Kota Surabaya.

Relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya telah menjalankan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan oleh relawan demokrasi dengan cara bersamaan. Materi sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mencakup materi pendidikan pemilih guna mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada PILWALI 2020. Materi yang disampaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh relawan demokrasi antara lain yaitu pentingnya demokrasi, pemilihan, partisipasi; waktu pemilihan; tata cara pemberian suara pada surat suara; dan pengenalan terhadap pasangan calon. Materi tersebut kemudian diberikan kepada masyarakat yang sebelumnya materi tersebut telah disesuaikan dengan basis masing-masing.

Hasil penelitian menunjukan bahwa relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya memiliki suatu kedudukan atau status dalam tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota (PILWALI)

tahun 2020. Dalam hal ini, relawan demokrasi KPU Kota Surabaya memiliki status sebagai mitra KPU Kota Surabaya yang memiliki tugas untuk membantu kinerja KPU khususnya di bidang sosialisasi. Relawan demokrasi KPU Kota Surabaya telah melakukan perannya sebagai pelopor demokrasi yang dibentuk di setiap basis untuk menjadi penyuluh di komunitasnya.

1) Sosialisasi Pilwali

Hak dan kewajiban yang telah dilakukan oleh relawan demokrasi adalah melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Sasaran sosialisasi yang dituju oleh relawan demokrasi telah diatur dalam PKPU RI Nomor 8 tahun 2017 bahwa terdapat 10 basis pemilih yang menjadi sasaran relawan demokrasi yaitu basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, penyandang disabilitas, perempuan, pemilih berkebutuhan khusus, keagamaan, komunitas, pemilih marginal, dan warga internet (netizen). Dalam menunjang kinerja KPU Kota Surabaya dalam agenda sosialisasi, relawan demokrasi melakukan sosialisasi dengan cara langsung dan tidak langsung. Sebagian besar sosialisasi dilakukan secara langsung oleh semua basis, diantaranya yaitu basis keluarga, basis pemilih muda, basis marjinal, dan basis perempuan. Sedangkan, basis pemilih pemula, basis warga internet, dan basis penyandang disabilitas melakukan sosialisasi dengan cara *hybrid* yaitu secara langsung dan sosialisasi secara daring.

Relawan demokrasi KPU Kota Surabaya melakukan sosialisasi secara langsung dengan berbagai cara, diantaranya yaitu diskusi, *door to door*, kerjasama organisasi/mitra, dan ikut dalam forum warga. Sosialisasi secara tatap muka antara relawan demokrasi dan masyarakat dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Meskipun, selama masa kerja relawan demokrasi tidak diberikan layanan tes kesehatan untuk bekal melakukan sosialisasi, relawan demokrasi harus tetap menjaga protokol kesehatan agar sosialisasi yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Sosialisasi secara tidak langsung merupakan cara sosialisasi dimana masyarakat yang menjadi sasaran tidak terlibat secara langsung dalam proses pemberian materi. Dalam hal ini, media dan startegi sosialisai harus diperhatikan secara menyeluruh agar materi sosialisasi dapat dimengerti oleh masyarakat. Basis pemilih pemula melakukan sosialisasi melalui platform *zoom* dengan siswa sekolah menengah atas. Sedangkan basis penyandang disabilitas, selain melakukan sosialisasi secara langsung mereka juga melakukan sosialisasi melalui platform *zoom* dan melakukan siaran radio milik komunitas penyandang tunanetra. Basis warga internet yang melakukan sosialisasi dengan cara mengunggah berbagai pamflet/poster yang berisikan ajakan serta segala informasi seputar PILWALI 2020 melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Berdasarkan pada hasil wawancara, relawan demokrasi menyampaikan informasi mengenai jadwal pelaksanaan pilwali, dan sosialisasi surat suara, dan pengenalan pasangan calon.

a) Sosialisasi jadwal pelaksanaan pilwali 2020

Relawan demokrasi menyampaikan mengenai timeline kegiatan pemilihan walikota dan wakil walikota yaitu dimulai dari waktu berakhirnya kampanye peserta pemilihan, masa tenang pemilihan, hingga waktu berlangsungnya pemilihan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh anggota relawan demokrasi bahwa dalam melakukan sosialisasi ditekankan pada pemberian informasi mengenai waktu pemilihan .

b) Sosialisasi surat suara dan pengenalan peserta pilwali 2020

Sosialisasi mengenai surat suara ini menjadi penting karena pada pilwali Kota Surabaya tahun 2020, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota berganti setelah 2 periode kepemimpinan oleh Ibu Tri Rismaharini. Dalam melakukan sosialisasi mengenai pengenalan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, relawan demokrasi juga menginformasikan visi dan misi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2020. Surat suara yang dipertunjukkan bukanlah surat suara yang memiliki gambar peserta pilwali, melainkan hanya berupa siluet untuk menghindari bias terhadap salah satu pasangan calon.

2) Pendidikan Pemilih

Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa pendidikan pemilih merupakan proses penyampaian informasi kepada pemilih guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih mengenai pemilihan. Dalam melaksanakan tugasnya, pendidikan pemilih yang diberikan oleh relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya, diketahui tidak memberikan pendidikan pemilih secara menyeluruh kepada seluruh basis sasaran, melainkan hanya dilakukan oleh beberapa basis saja yakni basis keluarga, pemuda, pemula, perempuan, dan basis disabilitas. Relawan demokrasi dalam menjalankan tugasnya hanya fokus memberikan sosialisasi dan tidak menyampaikan pendidikan pemilih kepada masyarakat.

Pendidikan pemilih yang disampaikan oleh relawan demokrasi berisikan materi yang dapat menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pemilihan seperti menyampaikan tata cara memberikan suara dengan benar dan mengajak masyarakat untuk menolak *money politic*. Sosialisasi dan pendidikan pemilih diberikan oleh relawan demokrasi dilakukan secara bersamaan dan dengan metode yang sama. Relawan demokrasi arah tugasnya menjadi 2, yakni melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelompok dan secara individu. Sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelompok dilakukan secara bersama-sama oleh satu basis relawan demokrasi. Sedangkan secara individu yakni melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh masing-masing anggota relawan demokrasi. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh LB dan IK anggota relawan demokrasi basis perempuan dan pemuda, dimana sosialisasi dan pendidikan pemilih juga dilakukan secara individu ke rekan-rekan terdekat namun tetap memperhatikan kode etik yang telah ditentukan oleh KPU Kota Surabaya.

Dalam memberikan pendidikan pemilih metode yang digunakan oleh relawan demokrasi KPU Kota Surabaya tidak berbeda dengan metode sosialisasi. Pendidikan pemilih juga diberikan dengan metode yang berbeda-beda disetiap basisnya. Basis keluarga yang menggunakan metode *door to door*, basis pemuda yang melakukan kerjasama dengan organisasi, basis pemula yang melakukan sosialisasi via *zoom*, basis perempuan dengan mengikuti forum warga, dan basis disabilitas yang memberikan pendidikan pemilih dengan metode *door to door* dan melakukan siaran radio. Pendidikan pemilih diberikan disela-sela penyampaian sosialisasi mengenai waktu pemilihan dan pengenalan pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Pendidikan pemilih yang diberikan oleh relawan demokrasi KPU Kota Surabaya hanya diberikan kepada beberapa basis saja, yakni basis keluarga, pemuda, pemula, perempuan, dan basis disabilitas. Dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat, relawan demokrasi lebih menekankan pada pemberian informasi mengenai tata cara mencoblos dengan benar, waktu pemilihan, dan pengenalan pasangan calon walikota dan wakil walikota.

a) Penyampaian tata cara memberikan suara dalam pemilihan 2020

Pada pemilu/pemilihan seringkali masyarakat merasa bingung dengan sistem atau model pemilihan pada saat di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Terlebih lagi pada pemilihan serentak tahun 2020, diadakan pada situasi khusus yaitu ditengah merebaknya pandemi virus Covid-19 sehingga terdapat beberapa perubahan model pemilihan di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Berdasarkan pada hasil wawancara, dalam hal ini relawan demokrasi memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat mengenai bagaimana cara memilih yang benar, bagaimana melipat surat suara yang benar, sehingga suara yang disampaikan menjadi suara yang sah. Terlebih lagi bagi para pemilih pemula yang notabenenya mereka baru menggunakan hak suaranya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh AN anggota relawan demokrasi basis pemula, dimana dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula sangat penting karena pemilih pemula merupakan pemilih yang baru menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali sehingga diperlukan pemahaman bahwa suara dari masyarakat sangat penting dan agar suara tersebut tidak sia-sia sehingga diberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih mengenai tata cara memilih pada surat suara. Penyampaian informasi mengenai tata cara memberikan suara pada surat suara dilakukan oleh semua basis relawan demokrasi KPU Kota Surabaya.

b) Mengajak untuk menolak *money politic*

Relawan Demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya menjelang PILWALI 2020 mengajak masyarakat untuk menghindari money politic yang kerap terjadi menjelang pemilihan. Ajakan kepada masyarakat untuk menolak money politic menjadi amat penting dalam menciptakan pemilu/pemilihan yang berkualitas karena nantinya pemimpin yang terpilih merupakan pemimpin yang layak untuk memimpin dan bukan karena uang. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh LB selaku anggota relawan demokrasi basis perempuan dimana dirinya menyampaikan kepada ibu-ibu agar mereka menggunakan

hak pilihnya dengan bijak dan tidak terpaku pada uang yang telah diberikan oleh salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota karena uang tersebut tidak memiliki nilai yang sama apabila dibandingkan 5 (lima) tahun masa kerja pemimpin tersebut.

c) Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan

Kesadaran politik masyarakat menjadi penting karena mencakup penggunaan hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di tps menjadi tolak ukur kesuksesan pada pemilihan. Tingkat partisipasi yang tidak signifikan dan meningkatkan angka golput disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan dalam kehidupan bernegara. Dalam hal ini, relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan dinilai masing kurang. Hal tersebut terlihat ketika peneliti bertanya mengenai kegiatan yang dilakukan relawan dalam membangun kesadaran masyarakat, dimana dari ke-7 anggota relawan demokrasi dari berbagai basis hanya 2 yang dapat menjawab pertanyaan peneliti dengan yakin. Dalam hal ini relawan demokrasi memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilihan dan pentingnya menggunakan hak suara serta dampak langsung dari pemilihan tersebut.

d) Membangun kesukarelaan masyarakat dalam pemilihan

Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan karena dalam hal ini masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya selama 5 (lima) tahun kedepan. Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan akan meningkat apabila masyarakat sendiri memiliki kesukarelaan dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam membangun kesukarelaan masyarakat Kota Surabaya untuk menggunakan hak pilihnya, relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya meyakinkan masyarakat bahwa 1 (satu) suara dari mereka itu berate bagi kepemimpinan 5 tahun kedepan. Seperti yang dikatakan oleh FN anggota relawan demokrasi basis disabilitas, dimana dirinya dan rekan-rekannya dalam menyakinkan masyarakat mengenai pentingnya menggunakan suara pada pemilihan dibantu oleh petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan tujuan agar masyarakat penyandang disabilitas lebih yakin bahwa setiap kesulitan pada saat memilih dapat diatas dan telah dijamin oleh petugas yang bertugas. Berbeda dengan FN, relawan demokrasi basis pemilih pemula dalam membangun kesukarelaan masyarakat melakukan diskusi terbuka mengenai pelajar sebagai pemilih. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh AN anggota relawan demokrasi basis pemilih pemula, dimana dirinya dan rekan-rekannya menyampaikan urgensi pelajar untuk sadar akan demokrasi dan pentingnya suara dari pemilih pemula dengan tujuan untuk membangun kesadaran pelajar untuk peduli dalam dunia politik.

Relawan demokrasi dalam melakukan perannya sebagai pelopor demokrasi di setiap komunitasnya telah memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat sesuai dengan basis sasaran. Peranan yang dilakukan oleh relawan demokrasi dinilai berhasil bagi KPU Kota Surabaya selaku

pembentuk, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya angka partisipasi masyarakat pada PILWALI 2020 dibandingkan pada pemilihan sebelumnya. Angka partisipasi masyarakat Kota Surabaya pada PILWALI 2020 mengalami peningkatan sebanyak 0,23% yaitu sebesar 52,40% sedangkan pada PILWALI 2015 sebesar 52,17%. Kenaikan tersebut dianggap sebagai keberhasilan tersendiri baik bagi KPU Kota Surabaya selaku penyelenggara dan bagi relawan demokrasi selaku mitra KPU Kota Surabaya dalam menjalankan agenda sosialisasi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pihak KPU Kota Surabaya, dimana relawan demokrasi dibentuk oleh KPU Kota Surabaya untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh KPU Kota Surabaya.

Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan pada hasil wawancara dengan ke-7 anggota relawan demokrasi dari berbagai basis dapat disimpulkan bahwasanya relawan demokrasi belum melakukan perannya dengan maksimal. Relawan demokrasi belum dapat membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilihan hingga membangun kesukarelaan masyarakat untuk memilih. Dalam melakukan tugasnya, relawan demokrasi hanya melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih mengenai waktu pemilihan, pengenalan pasangan calon, tata cara mencoblos dengan benar, dan menolak money politic. Dalam membangun kesadaran dan kesukarelaan masyarakat, relawan demokrasi dinilai masih kurang. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh CR anggota relawan demokrasi basis marjinal, dimana dirinya hanya menginformasikan mengenai waktu pemilihan dan teknis mencoblos dengan benar. Selaras dengan yang disampaikan oleh CR, relawan demokrasi dalam melakukan tugasnya belum dapat membangun rasa kesukarelaan masyarakat untuk memilih, relawan demokrasi belum menjalankan peranannya secara maksimal, terutama dalam memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Peranan relawan demokrasi yang belum maksimal tersebut berdampak pada angka partisipasi masyarakat yang mengalami kenaikan tidak signifikan. Dalam hal ini KPU Kota Surabaya telah membentuk relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Surabaya, namun fakta di lapangan berkata lain. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Surabaya pada PILWALI 2020 memang mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut tidak signifikan dan tidak jauh beda dengan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan sebelumnya. Seharusnya, sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diberikan oleh relawan demokrasi kepada masyarakat dapat membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan dapat meningkat.

Dibentuknya relawan demokrasi oleh KPU Kota Surabaya pada saat menjelang pemilihan walikota dan wakil walikota Surabaya seharusnya menjadi titik balik partisipasi masyarakat Kota Surabaya. Partisipasi masyarakat pada PILWALI Kota Surabaya tahun 2020 tidak mengalami kenaikan yang signifikan, terlebih lagi pada menjelang PILWALI 2020, KPU Kota Surabaya telah membentuk program relawan demokrasi agar partisipasi masyarakat dapat meningkat. Terdapat beberapa faktor penyebab tidak meningkatnya partisipasi masyarakat pada PILWALI Kota Surabaya tahun 2020, diantaranya yaitu pandemi virus Covid-19, kondisi alam/cuaca yang tidak mendukung pada hari H pemilihan, warga

perumahan yang cenderung acuh, kultur masyarakat Surabaya yang kebanyakan pendatang, dan kepadatan pemukiman dan lahan yang terbatas sehingga masyarakat enggan untuk datang memilih karena adanya kerumunan. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat tersebut seharusnya dapat diatasi oleh KPU Kota Surabaya, terlebih lagi pada menjelang PILWALI 2020, KPU Kota Surabaya dibantu oleh banyak pihak dalam menjalankan agenda sosialisasi, salah satunya yaitu relawan demokrasi. Dalam hal ini, relawan demokrasi tidak memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menyeluruh kepada masyarakat Kota Surabaya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh pihak KPU Kota Surabaya, dimana relawan demokrasi dibentuk untuk membantu KPU Kota Surabaya menjalankan agenda sosialisasi kepada masyarakat yang belum tergapai oleh KPU Kota Surabaya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa adanya relawan demokrasi pada PILWALI 2020 tidak berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Surabaya pada pemilihan. Hal tersebut dibandingkan dengan peranan yang belum maksimal oleh relawan demokrasi dan anggaran yang telah dikeluarkan oleh KPU Kota Surabaya untuk membentuk program relawan demokrasi.

Program relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya pada menjelang PILWALI 2020 merupakan program yang terkesan dipaksa untuk diadakan. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan yang dilakukan oleh relawan demokrasi yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, kendala-kendala internal yang berasal dari KPU Kota Surabaya, hingga angka partisipasi masyarakat yang tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Program relawan demokrasi seharusnya dapat menjadi sarana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, sehingga program ini perlu untuk diadakan di setiap pemilu/pemilihan. Agar dapat berjalan sesuai dengan tupoksi dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, maka anggota relawan demokrasi harus dapat memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap partisipasi masyarakat. Sehingga adanya relawan demokrasi ini tidak terkesan sia-sia dan pada pemilu/pemilihan selanjutnya relawan demokrasi dapat berjalan dengan lancar.

4.2 Analisis Tindakan Relawan Demokrasi dalam Memberikan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Kota Surabaya

Tindakan sosial menurut Weber merupakan tindakan yang berorientasi pada motif dan tujuan pelaku atau aktor. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut mempunyai makna subjektif bagi pelaku dan tindakan yang dilakukan diarahkan kepada orang lain dan bukan benda mati. Sejalan dengan teori Max weber, tindakan relawan demokrasi dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Dibentuknya program relawan demokrasi oleh KPU Kota Surabaya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada PILWALI 2020. Dalam hal ini, KPU Kota Surabaya menakankan kepada relawan demokrasi untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya sehingga angka partisipasi masyarakat dapat meningkat. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diberikan oleh relawan demokrasi kepada masyarakat dijadikan sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya, atas dasar rasionalitas tindakan sosial, tindakan yang dilakukan oleh relawan demokrasi dapat dibedakan ke dalam 4 tipe tindakan sosial menurut Weber. Semakin rasional tindakan sosial maka semakin mudah pula tindakan tersebut dipahami.

1 Tindakan sosial rasionalitas instrumental

Sejalan dengan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max weber, dimana individu melakukan tindakan berdasarkan suatu tujuan dan apabila tindakan tersebut memiliki makna yaitu ketika berinteraksi dengan individu lain dan hasilnya dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Sama halnya dengan anggota relawan demokrasi yang memiliki tujuan tersendiri untuk mengikuti program yang digagas oleh KPU Kota Surabaya. Tujuan tersebut diantaranya yaitu ingin menyadarkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan baik benar serta menghilangkan *mindset* masyarakat mengenai politik yang hanya seputar uang saja, mengubah mindset pemilih perempuan agar lebih terbuka dan ikut serta dalam proses demokrasi hingga mengikuti program relawan demokrasi karena tergiur dengan bayaran dan sertifikat yang diberikan.

Jika dilihat dari beberapa tujuan informan mengikuti program relawan demokrasi, dapat dilihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh informan merupakan tindakan yang bersifat subyektif. Tujuan ke tujuh informan dalam mengikuti program relawan demokrasi merupakan tujuan yang memiliki makna tersendiri bagi dirinya. Berangkat dari tujuan informan untuk mengikuti program relawan demokrasi, dapat mempengaruhi tindakan-tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh informan. Tindakan yang dilakukan oleh relawan demokrasi dikatakan sebagai tindakan yang rasional karena dalam tindakan tersebut terdapat pertimbangan rasional mengenai tujuan dan alat yang digunakan. Sejalan dengan teori tersebut, sebelum relawan demokrasi melakukan sosialisasi dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, relawan demokrasi melakukan perencanaan diantaranya adalah dengan melakukan *meeting* internal untuk menentukan titik mana saja yang akan dilakukan sosialisasi, pembagian tugas antar individu dan mendiskusikan mengenai jam kerja mereka. Hal tersebut dilakukan oleh semua basis relawan demokrasi, kemudian setelah merencanakan program apa saja yang akan dilakukan, relawan demokrasi menentukan strategi atau metode yang digunakan untuk melakukan sosialisasi.

Relawan demokrasi KPU Kota Surabaya melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di 10 basis dengan menggunakan strategi atau metode yang berbeda-beda. Metode tersebut telah disesuaikan dengan setiap basis pemilihan dengan tujuan agar materi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi di setiap basis, basis keluarga melakukan sosialisasi dengan cara *door to door* ke rumah warga dan didampingi oleh rt/rw setempat, kemudian basis pemilih pemula melakukan sosialisasi di kampus dan sekolah-sekolah secara daring melalui aplikasi *zoom*. Basis pemilih muda melakukan sosialisasi tatap muka dan bekerjasama dengan organisasi kepemudaan seperti remaja masjid (remas) dan karang taruna. Basis perempuan melakukan sosialisasi tatap muka di PKK dan komunitas ibu-ibu arisan, senam, dan pengajian. Basis disabilitas

melakukan sosialisasi dengan sistem *hybrid* di mahasiswa disabilitas yang tergabung dalam *Airlangga Inclusife Learning* (AIL) melalui *zoom*, melakukan siaran radio di komunitas mata hati, dan mendatangi langsung tiara *handcraft* untuk melakukan sosialisasi tatap muka. Basis marjinal melakukan sosialisasi tatap muka di tempat-tempat terpencil dan perkampungan kumuh di Kota Surabaya. Basis warga internet melakukan sosialisasi dengan sistem *hybrid*, dimana mengunggah materi sosialisasi di media sosial masing-masing dan melakukan sosialisasi tatap muka di cafe-cafe yang ada di Surabaya.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh relawan demokrasi dapat dikatakan sebagai tindakan rasionalitas, karena tindakan yang dilakukan oleh relawan demokrasi bukan semata-mata tindakan yang asal dilakukan, melainkan tindakan yang didalamnya penuh dengan pertimbangan dan perencanaan. Strategi sosialisasi yang beragam yang dilakukan oleh relawan demokrasi digunakan sebagai alat atau sarana bagi relawan demokrasi mencapai tujuannya. Dalam hal ini, perencanaan program dan menentukan strategi sosialisasi mencerminkan tindakan rasionalitas instrumetal, dimana sebelum relawan demokrasi sebelum bertindak mempertimbangkan dan merencanakan tindakan yang akan mereka lakukan dan akibat-akibatnya. Cara berpikir rasional relawan demokrasi mendorong mereka untuk melakukan pertimbangan dan perencanaan dari suatu tindakan. Hal tersebut sesuai dengan ciri tindakan rasionalitas instrumetal dimana dalam tindakan ini pertimbangan dan perencanaan oleh aktor dalam melakukan tindakan menjadi sorotan.

2 Tindakan rasionalitas nilai

Sejalan dengan teori Max Weber, Relawan demokrasi dalam melakukan sosialisasi di masyarakat wajib untuk mematuhi kode etik yang telah ditetapkan pada Surat KPU RI Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 yaitu relawan demokrasi harus bersikap independen dan tidak memihak terhadap peserta pemilihan, tidak melakukan tindak kekerasan atau perbuatan tercela, menghormati adat dan budaya setempat, tidak bertindak diskriminatif, dan tidak menerima pemberian atau gratifikasi dalam bentuk apapun dari peserta pemilihan. Kode etik tersebut harus dipatuhi oleh anggota relawan demokrasi ketika menjadi relawan dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Dalam hal ini, apabila terdapat anggota yang melakukan pelanggaran kode etik akan diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai relawan demokrasi.

Sebelum relawan demokrasi melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal pertama yang dilakukan setelah melakukan survey titik lokasi sosialisasi adalah meminta izin ke beberapa tempat atau titik yang akan mereka lakukan sosialisasi. Hal tersebut dilakukan oleh semua basis relawan demokrasi, dalam kutipan wawancara SA selaku anggota basis keluarga menjelaskan bahwa relawan demokrasi basis keluarga meminta ijin ke rt/rw setempat untuk melakukan sosialisasi yang kemudian menjelaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya merupakan relawan yang dibentuk oleh KPU dan bersifat netral. Selanjutnya, basis warga internet sebelum melakukan sosialisasi di cafe-cafe yang ada di Surabaya mereka terlebih dahulu memperkenalkan diri dan meminta ijin kepada pihak cafe untuk melakukan sosialisasi. Tindakan

relawan demokrasi ketika melakukan izin dan pendekatan pada masyarakat merupakan salah satu tindakan yang berorientasi pada nilai kesopanan yang ada di masyarakat. Keputusan relawan demokrasi dalam meminta izin didasarkan atas pertimbangan nilai kesopanan, apabila tidak mempertimbangkan nilai kesopanan maka kegiatan yang dilakukan oleh relawan demokrasi akan dianggap tidak wajar, tidak sopan, menyalahi aturan, bahkan bisa mendapatkan persepsi yang negatif dari masyarakat setempat.

Ketika relawan demokrasi meminta izin atau melakukan pendekatan yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, maka tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi akan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Sehingga, sosialisasi dapat berjalan dengan lancar dan materi yang disampaikan oleh relawan demokrasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian, ketika materi sosialisasi dapat diterima oleh masyarakat, maka dapat menyadarkan masyarakat serta meningkatkan rasa kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi sehingga dapat mewujudkan pemilihan yang demokratis.

3 Tindakan tradisional

Program relawan demokrasi yang digagas oleh KPU RI selalu dilakukan rutin di setiap pemilihan, secara tidak langsung dibentuknya relawan demokrasi ini telah menjadi agenda rutin yang selalu ada di setiap pemilu/pemilihan. KPU Kota Surabaya selaku penyelenggara pemilu/pemilihan telah membentuk relawan demokrasi di pemilu/pemilihan sebelumnya, misal pada saat PILGUB 2018, PEMILU 2019, dan PILWALI 2020. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tian bahwasannya relawan demokrasi KPU Kota Surabaya telah rutin dibentuk di setiap pemilu/pemilihan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 kemarin. Sehingga, adanya relawan demokrasi di pemilihan sudah menjadi tradisi sendiri bagi KPU Kota Surabaya.

Sejalan dengan pengertian tipe tindakan tradisional Weber, tindakan KPU Kota Surabaya dalam membentuk relawan demokrasi dapat dikatakan sebagai tindakan tradisional, karena program yang digagas di setiap pemilu/pemilihan ini sudah menjadi tradisi sendiri bagi KPU selaku penyelenggara. Berangkat dari tindakan yang sudah lazim atau sering dilakukan tersebut, memungkinkan KPU Kota Surabaya sebagai pembentuk program relawan demokrasi di Surabaya pada PILWALI 2020 kurang merencanakan program ini dengan baik, sehingga menimbulkan beberapa kendala seperti kurangnya pembekalan saat bimtek (bimbingan teknis), keperluan sosialisasi yang telat diberikan, anggaran yang kecil, dll. Anggaran yang diberikan oleh KPU Kota Surabaya cenderung sedikit, karena antara anggaran pribadi dan anggaran sosialisasi dijadikan satu, sehingga relawan demokrasi harus mengeluarkan uang pribadi untuk memberikan cendra mata kepada masyarakat yang telah diberikan sosialisasi.

Tindakan KPU Kota Surabaya dalam membentuk relawan demokrasi merupakan tindakan yang tidak rasional dan hanya mengacu pada tradisi yang sudah ada. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kendala yang dirasakan oleh beberapa anggota relawan demokrasi, KPU Kota Surabaya sebagai pembentuk relawan demokrasi hanya mengacu pada konsep kegiatan yang telah lalu dan tidak disesuaikan dengan

kondisi saat ini. Sebelum relawan demokrasi melakukan sosialisasi di masyarakat, KPU Kota Surabaya mengadakan bimbingan teknis untuk relawan demokrasi. Bimbingan teknis yang diberikan oleh KPU Kota Surabaya sebanyak 2 kali, minimnya pembekalan oleh KPU Kota Surabaya mengakibatkan sosialisasi tidak berjalan dengan maksimal karena pengetahuan relawan demokrasi yang minim. Selanjutnya, kendala internal antara KPU Kota Surabaya dan relawan demokrasi menghambat proses sosialisasi. Anggaran dan perlengkapan sosialisasi yang minim menjadi faktor utama relawan demokrasi tidak dapat melaksanakan peranannya dengan maksimal, sehingga memberi kesan KPU Kota Surabaya tidak merencanakan program relawan demokrasi pada PILWALI 2020 dengan baik. Apabila ditinjau dari tipe tindakan sosial Max Weber, maka program relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya merupakan suatu tindakan yang dilakukan karena kebiasaan tanpa adanya perencanaan yang matang. Dalam hal ini, KPU Kota Surabaya tidak mempertimbangkan aspek rasional, dimana seharusnya ketika telah dibentuk relawan demokrasi pada PILWALI 2020 seharusnya partisipasi masyarakat dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditentukan. Faktanya ketika membentuk relawan demokrasi, KPU Kota Surabaya hanya mengedepankan aspek kebiasaan, dimana program ini telah menjadi agenda KPU Kota Surabaya di setiap pemilu/pemilihan sehingga sebagai pembentuk KPU Kota Surabaya tidak merencanakan program ini dengan rasional oleh karena itu pada PILWALI 2020 partisipasi masyarakat tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh KPU RI. Hal tersebut didukung oleh penjelasan LB yang telah menjadi relawan demokrasi pada PEMILU 2019 menjelaskan bahwa program relawan demokrasi pada PILWALI 2020 sedikit berbeda dengan program relawan demokrasi di tahun-tahun sebelumnya, menurutnya pada program PILWALI 2020 memiliki banyak kendala sehingga terkesan program tersebut kurang direncanakan dengan baik oleh KPU Kota Surabaya.

4 Tindakan afektif

Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok berdasarkan pada perasaan atau emosi aktor. Tindakan ini seringkali bersifat spontan, tidak rasional, dan merupakan sebuah ekspresi emosional dari individu. Sejalan dengan teori tersebut, maka tindakan afektif yang dilakukan oleh relawan demokrasi adalah ketika tujuan anggota mengikuti program relawan demokrasi terdapat perasaan peduli atau simpati terhadap masyarakat untuk memberikan pendidikan pemilih agar masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses demokrasi. Misalnya seperti CR anggota relawan demokrasi yang memilih untuk masuk relawan demokrasi basis marjinal karena ingin menyadarkan masyarakat marjinal yang hanya terfokus pada mencari uang tentang pentingnya memilih pada pemilihan. Dalam hasil wawancara, CR menjelaskan bahwa dirinya ingin mengedukasi masyarakat yang awam dengan teknologi dan informasi, terlebih lagi di zaman sekarang yang semakin canggih dan masyarakat masrjinal cenderung acuh dan hanya fokus untuk mencari uang. Tindakan CR ini dapat dikatakan tindakan afektif, dimana tindakan tersebut dipengaruhi oleh perasaan simpati CR terhadap masyarakat marjinal yang kemudian membuat CR memilih untuk masuk dalam basis marjinal.

Selain CR, terdapat anggota relawan demokrasi lain yaitu FN dan LB yang memilih masuk basis disabilitas dan basis perempuan karena adanya rasa peduli terhadap sesama. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh FN selaku anggota relawan demokrasi basis disabilitas. FN menjelaskan bahwa dirinya mengikuti program relawan demokrasi dan memilih basis disabilitas adalah karena FN ingin mencari sesuatu yang berbeda dan mempelajari ilmu baru, selain itu FN juga menjelaskan bahwa dirinya seringkali melihat masyarakat penyandang disabilitas kebingungan ketika mereka hendak menggunakan hak pilihnya di tps. Bentuk respon FN secara emosional terhadap masyarakat penyandang disabilitas menimbulkan perilaku FN yang peduli, empati yaitu membantu mengedukasi masyarakat penyandang disabilitas agar tidak lagi merasa kebingungan ketika menggunakan hak pilihnya. Sedangkan alasan LB memilih basis perempuan adalah adanya rasa peduli terhadap perempuan terutama ibu-ibu di wilayahnya yang sibuk yang sibuk di sektor domestik sehingga mereka tidak mengerti harus memilih siapa, mengapa harus memilih, serta hanya sekedar ikut-ikutan. Berangkat dari rasa peduli yang dirasakan oleh LB, membuat dirinya melakukan tindakan yang dapat bermanfaat juga bagi perempuan, yaitu memberikan pendidikan pemilih kepada ibu-ibu agar mereka menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan bukan karena ikut-ikutan atau karena mendapat “serangan fajar”.

Tindakan yang dilakukan oleh ketiga informan diatas didasari atas emosi yang dilakukannya tanpa sadar. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan manusia lain dalam kehidupan, oleh karena itu manusia melakukan interaksi sosial dalam masyarakat. Rasa peduli yang dirasakan oleh CR, FN, dan LB menjadikan mereka dapat memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain . Berangkat dari timbulnya rasa peduli tersebut yang kemudian mendorong CR, FN, dan LB merasa bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya sebagai agen sosialisasi dan sebagai mitra KPU Kota Surabaya dalam menjalankan agenda sosialisasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota 2020 di Kota Surabaya.

5. Kesimpulan

Relawan demokrasi melaksanakan tugasnya dengan melakukan sosialisasi mengenai waktu pemilihan dan pengenalan pasangan calon walikota dan wakil walikota. Sedangkan pendidikan pemilih yang disampaikan oleh relawan demokrasi yaitu mengenai tata cara mencoblos dengan benar, mengajak masyarakat untuk menolak money politic, membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan, dan membangun kesukarelaan masyarakat untuk memilih. Peranan yang dilakukan oleh relawan demokrasi dinilai belum maksimal karena relawan demokrasi belum bisa membangun kesadaran masyarakat dan kesukarelaan masyarakat Kota Surabaya untuk memilih pada PILWALI 2020. Hal tersebut dikarenakan tidak semua basis relawan demokrasi menyampaikan materi yang dapat membangun kesadaran masyarakat. Relawan demokrasi hanya terfokus pada penyampaian waktu pemilihan, pengenalan pasangan calon, dan tata cara mencoblos dengan benar. Sehingga, hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor naiknya angka partisipasi masyarakat pada PILWALI 2020 tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi KPU Kota Surabaya berbeda-

beda disetiap basisnya diantaranya yaitu dengan *door to door*, kerjasama dengan organisasi, secara daring, simulasi, diskusi hingga ikut serta dalam forum warga.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Tindakan Sosial oleh Max Weber. Tindakan KPU Kota Surabaya dalam membentuk relawan demokrasi dapat dikatakan sebagai tindakan sosial karena tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya merupakan tindakan yang berorientasi pada suatu tujuan, yakni untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Surabaya. Dalam teori tindakan sosial, Weber terdapat 4 tipe tindakan sosial, yaitu tindakan rasional instrumental dimana anggota relawan demokrasi memiliki tujuan tersendiri untuk mengikuti program relawan demokrasi dan tindakan yang dilakukannya bersifat subyektif sehingga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh informan. Kemudian, sebelum relawan demokrasi turun untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, relawan demokrasi merumuskan apa yang harus dilakukan dan menentukan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya. Tindakan rasionalitas nilai, tindakan relawan demokrasi sebelum melakukan sosialisasi mereka terlebih dahulu meminta izin dan melakukan pendekatan yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Tindakan tradisional, dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi dapat dikatakan sebagai tindakan tradisional, karena dalam setiap pemilu/pemilihan relawan demokrasi akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tindakan afeksi, tujuan anggota mengikuti program relawan demokrasi terdapat perasaan peduli atau simpati terhadap masyarakat untuk memberikan sosialisasi agar masyarakat ikut serta dalam proses demokrasi.

Daftar Pustaka

- [1] D. SUCIPTO, "PERAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut)," *J. Yustisiabel*, vol. 3, no. 2, p. 213, Oct. 2019, doi: 10.32529/yustisiabel.v3i2.399.
- [2] Anonim, "Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan," *Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>.
- [3] M. Farisi and R. Y. Maulana, "Peran Relawan Demokrasi (Relasi) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi," *Ganaya J. Ilmu Sos. ...*, vol. 3, no. 2, pp. 363–378, 2020, [Online]. Available: <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/506>.
- [4] A. M. Yuardani, U. Qadri, and E. Wahyuni, "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum," pp. 94–111, 2017.
- [5] F. Juliani, "FARIDA, J. (2021). PENDIDIKAN PEMILIH OLEH KPU KOTA MATARAM DALAM PELAKSANAAN PILKADA DIMASA PENDEMIC COVID-19 (Studi Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun Di Kota Mataram)," UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM, 2021.
- [6] J. Hakim, "Tingginya Angka Golput di Surabaya Memprihatinkan," *Tempo.co*, Surabaya, Jun.

2010.

- [7] S. Insani D, Fahrulisa & Nurlela & Junaeda, "FENOMENA PERILAKU TIDAK MEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2018 DI KELURAHAN MANGGALA," *J. ANTHROPOLOGY*, vol. 3, 2021.
- [8] A. I. Rozuli and M. Habbodin, "Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi," *Politea J. Polit. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 36–48, Apr. 2019, doi: 10.20414/politea.v1i1.811.
- [9] M. I. P. Alamsyah, "ANALISIS PERAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI KOTA MEDAN TAHUN 2019," UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, 2020.
- [10] Trisna, "Berita Relasi: Relasi Basis Keluarga Sosialisasi Pilwali di Kalijudan," *KPU KOTA SURABAYA*, 2020. <https://kpu-surabayakota.go.id/berita-relasi-relasi-basis-keluarga-sosialisasi-pilwali-di-kalijudan/>.
- [11] P. Febriantanto, "Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilu 2014 Di KPU Kota Yogyakarta," *J. Kaji. Ilm.*, vol. 18, no. 2, p. 137, 2018, doi: 10.31599/jki.v18i2.217.
- [12] Y. Witriya, "EFEKTIVITAS RELAWAN DEMOKRASI DI KOTA PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU 2019," UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN), 2020.
- [13] J.; I. D. S. SUSILO, "PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU SERENTAK 2019," pp. 531–541, 2019.
- [14] Z. A. Fitriyah, "PERAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILU SERENTAK 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO SKRIPSI," 2020, [Online]. Available: https://www.slideshare.net/maryamkazemi3/stability-of-colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.n.
- [15] K. K. Khotimah, "Kinerja KPUD Kota Batu dalam meningkatkan Electoral Activity pada PILGUB Tahun 2018," *Gov. J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 13, pp. 113–128, 2020, [Online]. Available: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/9375>.
- [16] S. Siregar, "KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN," *J. Ilm. Muqoddimah J. Ilmu Sos. ...*, no. 32, 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v1i1.2016.%25p>.

- [17] A. Muhlis and N. Norkholis, "ANALISIS TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER DALAM TRADISI PEMBACAAN KITAB MUKHTASHAR AL-BUKHARI (Studi Living Hadis)," *J. Living Hadis*, vol. 1, no. 2, p. 242, 2016, doi: 10.14421/livinghadis.2016.1121.
- [18] D. Gushendi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Dalam Tinjauan Teori Tindakan Sosial Max Weber: Studi di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku ...," pp. 1–104, 2019, [Online]. Available: <http://digilib.uinsby.ac.id/38246/>.
- [19] Sofiyana, "ANALISIS TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER DI LINGKUNGAN SEKITAR MASYARAKAT MAKASSAR DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI," 2020.
- [20] M. Syukur, *DASAR-DASAR TEORI SOSIOLOGI*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- [21] Helaluddin, "Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif," *Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, no. March, pp. 1–15, 2018.
- [22] A. M. H. Matthew B. Miles, "Qualitative Data Analysis An Expanded Sourcebook-Sage Publications." p. 1994.
- [23] KPU RI, "Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020," 2020.